



Tak Populer Naikkan Tarif Parkir

■ TUJUH...

Sambungan dari hal 1

Ketujuh ruas itu yakni Jalan Brigjend Katamsno, Jalan C. Simanjuntak, Jalan Laksda Adisutjipto, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Pangeran Diponegoro, Jalan Pangeran Mangkubumi, dan Jalan Tamansiswa.

Jalan-jalan tersebut dinilai susah sesak. Berdasarkan tingkat perbandingan antara volume kendaraan dengan luas jalan diketahui tingkat perbandingannya hampir sama. Perbandingannya 0,75 sampai 0,8. Angka itu menurut kategori ilmu transportasi hampir mendekati lalu lintas stagnan. Jika terjadi macet total maka angka perbandingannya adalah satu.

"Jika jam sibuk bisa sampai kritis atau di atas 0,8. Jam sibuk biasanya pada pagi hari jam masuk kantor dan sore hari pulang kerja," ujar Kepala Seksi Rekayasa Lalu Lintas Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Jogja Windarto Koeswando kemarin (10/6).

Dia menjelaskan, banyaknya

volume kendaraan itu terjadi karena di jalan-jalan tersebut memang menerapkan parkir di badan jalan. Bahkan, di kedua badan jalan diperbolehkan untuk tempat parkir kendaraan baik roda dua maupun empat.

"Gedung-gedung atau kompleks pertokoan banyak yang tidak memiliki lahan parkir. Akhirnya, parkir lari ke badan jalan," imbuh Windarto.

Gedung-gedung tersebut, lanjutnya, berdiri sebelum UU No 22 Tahun 2009 disahkan. Gedung-gedung tersebut baru diharuskan menyiapkan lahan parkir sendiri jika mengurus perizinan. "Kalau mengubah bangunan nanti ada dalam IMBB untuk membangun lahan parkir," sambungnya.

Windarto mengungkapkan, melihat gejala keruwetan lalu lintas itu Dishub Kota Jogja hanya bisa melakukan rekayasa. Dishub saat ini sedang mencoba mengatur parkir di Jalan Tamansiswa dan Jalan C. Simanjuntak.

"Rencananya akan dilakukan upaya pengaturan dengan menerapkan parkir satu sisi jalan baru dilakukan upaya lainnya

secara bertahap. Akan kami sesuaikan dengan kondisi masyarakatnya," jelasnya.

Kepala Seksi Manajemen Lalu Lintas Dishub Kota Jogja Azhar Setiawibawa mengatakan, sejumlah skema pengaturan arus lalu lintas untuk mengatasi kemacetan biasanya tak bisa berwujud kebijakan. Ini karena kebijakan tersebut termasuk tak populer bagi masyarakat.

Kebijakan itu antara lain menaikkan tarif parkir, menaikkan tarif pajak kendaraan bermotor, dan upaya lain guna menekan jumlah kendaraan. "Tapi jika hal ini diterapkan pasti mendapatkan pertentangan dari masyarakat. Sebab, mereka sudah nikmat dengan kendaraan pribadi," tuturnya.

Dia menambahkan, upaya yang bisa dilakukan hanya dengan meningkatkan pelayanan angkutan umum. Ini pun hanya memberikan pilihan kepada masyarakat agar beralih dari kendaraan pribadi ke kendaraan masal.

"Di Jogjakarta sudah ada Transjogja. Itu sebagai bagian dari upaya mengurangi kemacetan," terangnya. (eri/amd)



NGEBAKI DALAN: Parkir kendaraan bermotor di salah satu ruas jalan di Kota Jogja.

GUNTUR AGA TIRTANARADAN JOGJA

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 01 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005